



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website

Disampaikan bahwa Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2025 Kepala PPS Cilacap belum diterbitkan oleh KPK. Saat ini, data LHKPN telah berada dalam proses pengiriman kepada KPK dan masih menunggu proses penerbitan pengumuman secara berkala

1. Nama : Mahus
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Unit Kerja : PPS Cilacap, Kementerian Kelautan dan Perikanan

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN 2026**





KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Mengumumkan LHKPN Pejabat Negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam website

Diinformasikan bahwa Bapak Mahus pada Tahun Pelaporan 2024 belum termasuk dalam kategori penyelenggara negara yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

**PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP
TAHUN 2026**





PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IMAS MASRIAH
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 500784

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.285.600.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/90 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
2. Tanah Seluas 550 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000
3. Tanah Seluas 616 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 369.600.000
4. Tanah Seluas 810 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 486.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000
6. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/226 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 2.350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 378.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO MATIC Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000



3. MOTOR, N MAX YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
13.000.000

4. MOTOR, YAHAMA MIO SOUL 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

5. MOBIL, TOYOTA RAISE A250RA-GBVVJ 1.0T S CVT TSS Tahun
2021, HASIL SENDIRI Rp. 215.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 400.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.083.600.000

III. HUTANG Rp. 1.085.965.832

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.997.634.168

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG PRASTYO
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 257084

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	457.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 82 m2/62 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 100.000.000		
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI Rp. 357.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	12.000.000
1. MOTOR, HONDA BEAT MATIC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.502.444
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	476.002.444
III. HUTANG	Rp.	355.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	121.002.444

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SIGIT PURWOKO
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. NHK : 657383

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 910.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 153 m2/216 m2 di KAB / KOTA CILACAP, HASIL SENDIRI , Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/27 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 69.000.000

1. MOBIL, SUZUKI AERIO Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2007, WARISAN Rp. 3.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
4. MOTOR, HONDA ALL NEW CB150R Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 236.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 27.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. 7.500.000

Sub Total Rp. 1.250.000.000

III. HUTANG Rp. 102.500.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.147.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURUL FAJRI AL CHUSAENI
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 983202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	120.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 7 m2/67 m2 di KAB / KOTA CILACAP, Rp. 120.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	22.500.000
1. MOBIL, TOYOTA SEDAN Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	450.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	144.450.000
III. HUTANG	Rp.	143.873.509
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	576.491

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Maret 2019/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
SUB UNIT KERJA : PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TURWAHYUNI**
2. Jabatan : **BENDAHARA PENGELUARAN**
3. NHK : **657908**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	143.788.000
1. Tanah Seluas 693 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 50.470.000		
2. Tanah Seluas 712 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, Rp. 93.318.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	117.000.000
1. MOBIL, TOYOTA F601RM-GMMFJJ/AVANZA 1300 G Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 108.000.000		
2. MOTOR, HONDA NC12A1CBF A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	9.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	26.691.380
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	297.279.380
III. HUTANG	Rp.	66.925.650
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	230.353.730

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.



3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 September 2019**
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Januari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JULIA KOMALASARI
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 887387

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	7.500.000
1. MOTOR, HONDA NC12A1CBF A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI		
Rp. 7.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	42.411.035
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	49.911.035
III. HUTANG	Rp.	194.661.831
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	-144.750.796

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.